



Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pencapaian Pembangunan Milenium (MDGs)

Mohammad Mulyadi^{*)}

Abstrak

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut melaksanakan komitmen pembangunan milenium (Millennium Development Goals, selanjutnya disebut MDGs) yang targetnya akan dicapai tahun 2015. Keberhasilan pelaksanaan Deklarasi Milenium dan tercapainya MDGs sangat bergantung kepada kualitas sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM). Hal ini karena tanpa kualitas SDM, segala program yang telah direncanakan tidak akan terlaksana dengan baik. MDGs yang telah dideklarasikan oleh para pemimpin negara tersebut perlu didukung oleh kualitas SDM yang baik. Beberapa contoh kasus di negara-negara berkembang yang tidak dapat mengelola kekayaan sumber daya alamnya dapat dijadikan pelajaran berharga, bahwa MDGs akan dapat dicapai bila SDM sebagai pengelolanya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi terwujudnya MDGs di Indonesia.

Pendahuluan

Pada akhir dasa warsa 1950-an istilah 'pembangunan' sering dianggap sebagai 'obat' terhadap berbagai macam masalah yang muncul dalam masyarakat. Era awal dari pembahasan mengenai teori pembangunan adalah dikemukakannya 'Teori Pertumbuhan'. Menurut Clark, "Pemikiran mengenai teori pertumbuhan berasal dari pandangan kaum ekonom ortodoks yang melihat 'pembangunan' sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diasumsikan akan meningkatkan standar kehidupan."

Sekitar tahun 1980-an, strategi pembangunan mulai bergeser menjadi

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*). Strategi inipun masih mengalami masalah, yaitu ketergantungan negara berkembang kepada negara maju berupa investasi, bantuan luar negeri dan pinjaman. Kemudian sejak memasuki abad ke-20 muncul strategi baru, yaitu diterapkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didukung dengan konsep MDGs.

MDGs adalah deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang disepakati dan diadopsi oleh 189 negara. Dalam kesepakatan ini terdapat delapan butir tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015 dan mulai dijalankan pada September 2000.

^{*)} Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: mohammadmulyadi@yahoo.co.id

Pembangunan seringkali diidentikkan oleh masyarakat sebagai adanya penambahan bangunan (fisik) seperti gedung sekolah, puskesmas, pasar, dan jalan raya. Hal-hal di luar itu tidak dianggap sebagai pembangunan. Padahal pembangunan yang dimaksud dan jauh lebih penting dari sekadar dari itu adalah pembangunan SDM. SDM merupakan modal dasar pembangunan yang utama. SDM yang mana? SDM yang menjadi modal dasar pembangunan adalah manusia yang terdidik, terlatih, dan terampil dalam menangani masalah. Sebaliknya manusia yang tidak terdidik, terlatih, dan terampil justru akan memberatkan negara karena mereka tidak bisa menjadi bagian dari orang yang menyelesaikan masalah pembangunan tapi malah menjadi beban.

Dengan begitu, pembangunan harus dipahami sebagai proses perubahan dan diharapkan menghasilkan perbaikan hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Berangkat dari pemaknaan ini, maka MDGs merupakan gagasan yang tearah dan selaras dengan pembangunan positif yang dicita-citakan Indonesia.

MDGs di Indonesia

Upaya Pemerintah dalam merealisasikan MDGs pada tahun 2015 akan banyak mengalami hambatan karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Padahal, menurut Sekertaris Nasional (Seknas) Fitra Uchok Sky Khadafi, hutang luar negeri Indonesia pada tahun 2010 sebesar Rp1.677 triliun. Pada tahun anggaran 2011 utang luar negeri Indonesia sebesar Rp1.803 triliun dan pada tahun 2012 utang luar negeri Indonesia mencapai Rp1.937 triliun. Berdasarkan rasio utang tersebut, terdapat gejala bertambahnya utang luar negeri yang dapat mengakibatkan rendahnya dukungan keuangan negara dalam merealisasikan MDGs.

Sampai dengan pertengahan tahun 2012 ini, batas akhir untuk mencapai target pencapaian MDGs semakin dekat. Pertanyaannya adalah sejauh mana langkah Indonesia dalam mencapai target MDGs? Dalam pidato resmi Presiden SBY pada pertemuan PBB untuk pembangunan berkelanjutan atau dikenal juga dengan forum Rio+20 di *Riocentro Convention Center, Rio De Janeiro*, Presiden SBY menyebutkan bahwa: "Ekonomi dunia telah tumbuh dari 34 triliun USD sampai lebih dari 64 triliun USD pada saat ini. Perdagangan internasional telah tumbuh tiga kali lipat menjadi 28 triliun USD. Banyak negara telah menyeberang melewati status penghasilan menengah, termasuk Indonesia. Dan bersama dengan ini kemiskinan seluruh dunia telah berkurang secara signifikan dari 1,9 miliar pada tahun 1990 menjadi 1,29 miliar tahun 2008. Di Indonesia pun, kemiskinan telah menurun dari 24 persen pada tahun 1998 menjadi 12,5 persen beberapa hari ini."

Lebih lanjut SBY memaparkan bahwa "upaya Indonesia mencapai MDGs pada tahun 2015 juga menghadapi tantangan. Telah ada beberapa kemajuan, tetapi juga beberapa tantangan dalam mencapai target. Sebagai contoh, kita membuat kemajuan pada angka kematian bayi dan ibu, kemiskinan, harapan hidup, tetapi kita belum mencapai target MDGs untuk peningkatan gizi bagi anak-anak, sanitasi."

Secara umum, perkembangan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia sampai saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Beberapa indikator MDGs secara nasional telah tercapai dan sebagian besar target MDGs secara nasional diperkirakan akan tercapai (*on track*). Pemerintah mendapatkan apresiasi dari PBB atas capaian sampai saat ini dan komitmennya untuk mencapai sasaran MDGs pada akhir tahun 2015.

Menurut Prof. Armida, "pencapaian sasaran MDGs di tingkat nasional perlu didukung capaian di tingkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah, dunia usaha, masyarakat luas termasuk masyarakat madani, serta para tokoh agama. Meskipun beberapa sasaran MDGs telah tercapai dan *on track*,

upaya-upaya khusus perlu tetap dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja capaian MDGs.

Selain itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih keras lagi untuk mencapai sasaran MDGs seperti untuk penurunan angka kematian ibu melahirkan, pencegahan HIV/AIDS dan peningkatan tutupan lahan. Sementara itu, kesenjangan antardaerah dalam pencapaian sasaran MDGs perlu terus diperkecil, antara lain dengan memberikan perhatian yang lebih besar bagi daerah-daerah yang kinerja pencapaian MDGs-nya masih di bawah rata-rata nasional. Seluruh upaya untuk mencapai sasaran MDGs tersebut perlu didukung dengan penguatan sinergi antarkementerian/lembaga dan antara pusat dan daerah."

Hakikat Peningkatan Kualitas SDM dalam Pencapaian MDGs

Dikotomi orientasi pembangunan antara pertumbuhan dan pemerataan, sebagaimana diketahui, sudah berlangsung sejak lama. Akan tetapi, berbagai kajian ilmiah membuktikan bahwa pembangunan yang menekankan pada pemerataan lebih berdampak positif. Nilai positif ini setidaknya dapat dilihat dari orientasi pembangunan yang menekankan pada pemerataan akan mengangkat kesejahteraan penduduk secara lebih luas. Dengan begitu, lebih banyak penduduk yang dapat menikmati hasil pembangunan. Selain itu, secara timbal balik, karena semakin banyaknya penduduk yang kesejahteraannya meningkat, pada gilirannya akan lebih banyak lagi SDM yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian keberlanjutan pembangunan menjadi lebih pasti. Sebaliknya orientasi pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan akan lebih menghasilkan kesenjangan dalam masyarakat.

Menghadapi 'tantangan' MDGs, pemerintah perlu memikirkan strategi yang 'ampuh' agar segala upaya yang diarahkan untuk mencapai MDGs dapat terwujud. Salah satu cara yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah peningkatan

kualitas SDM. Hal ini berimplikasi pada adanya kewajiban pemerintah untuk mengarahkan, membimbing, membina serta menciptakan suasana yang menunjang peningkatan kualitas SDM. Usaha ini berarti mendudukkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan harus didukung agar masyarakat bisa merasakan bahwa manfaat pembangunan adalah untuk masyarakat itu sendiri.

Ada beberapa hal yang menyebabkan bangsa Indonesia harus menekankan pada investasi pada manusia dalam mengejar perbaikan tingkat kesejahteraan.

Pertama, pengalaman dalam sejarah dunia membuktikan bahwa sangat jarang negara yang mampu berkembang tumbuh berkelanjutan sekedar mengandalkan pada sumber daya alam yang dimilikinya. Contoh yang kontras bisa kita bandingkan antara dua Korea: Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara yang lebih kaya sumber daya alamnya jauh ketinggalan dibandingkan dengan Korea Selatan yang miskin sumber daya alamnya tetapi sepenuhnya mengandalkan pada pengembangan manusia.

Kedua, pengalaman dalam mengurangi kemiskinan di banyak negara menunjukkan, pertumbuhan ekonomi – walaupun masih menjadi resep ampuh dalam mengurangi kemiskinan – menjadi kurang efektif tanpa diimbangi dengan perbaikan kesenjangan pendapatan. Dalam Konferensi Asia 2015 yang baru saja berakhir di London, salah satu makalah kunci menunjukkan bahwa perbedaan pencapaian pengurangan kemiskinan yang dicapai dengan pertumbuhan ekonomi tanpa perbaikan kesenjangan dan pola pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan distribusi pendapatan berkisar antara 20-50%. Perbaikan kesenjangan pendapatan ini hanya dapat dicapai dengan melakukan investasi dalam pembangunan manusia baik dalam peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan maupun dalam bidang kesehatan.

Ketiga, pengalaman di Amerika Latin menunjukkan pula tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan telah menghambat perekonomian tumbuh sesuai dengan

potensinya. Masalah di atas timbul sebagian besar akibat negara-negara Amerika Latin cenderung mengabaikan investasi pada manusia khususnya rumah tangga miskin sehingga pada saat kesempatan ekonomi makin meluas, kelompok rumah tangga ini tertinggal dan pada gilirannya menyebabkan timbulnya masalah sosial. Pelajaran ini menjadi bahan yang berharga bagi bangsa Indonesia agar mampu tumbuh berkelanjutan sesuai dengan cita-cita bangsa dalam pembukaan UUD 1945.

Laporan dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan 12 April 2012 membuktikan bahwa SDM adalah kunci pencapaian target MDGs. Laporan yang disusun oleh UN-Water dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyebutkan, ada 74 negara berkembang - naik dari 43 negara pada 2010 - yang kekurangan keahlian teknis dan SDM guna mengoperasikan dan merawat fasilitas air dan sanitasi hasil bantuan 24 lembaga bilateral dan multilateral. Kualitas SDM menjadi kunci tersedianya pasokan air dan layanan sanitasi di sejumlah negara berkembang. Berdasarkan laporan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa berbagai program yang direncanakan maupun sementara dijalankan tidak akan memberikan hasil yang optimal jika tidak didukung oleh kualitas SDM.

Penutup

MDG's adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama negara anggota PBB untuk melaksanakan beberapa isu kritis pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut melaksanakan komitmen tersebut dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. MDGs tersebut ditargetkan untuk dapat dicapai

pada tahun 2015. Semua pencapaian komitmen MDGs harus diimbangi dengan SDM yang dimiliki juga. Salah satu modal dasar untuk mempercepat pencapaian MDGs tersebut dibutuhkan peningkatan kualitas SDM Indonesia. Peningkatan kualitas SDM yang dimiliki ini harus bisa dipahami dalam keterkaitannya dengan perubahan-perubahan sosial yang juga terus terjadi. Walaupun, peningkatan kualitas SDM ini jauh lebih sulit dibandingkan membangun proyek fisik karena hasilnya akan sangat abstrak dan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah akan pentingnya peningkatan kualitas SDM harus terus-menerus di dorong. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR sebagai manifestasi dari mekanisme *check and balances* dalam sistem demokrasi dapat dilakukan melalui beberapa Komisi yang ada di dalamnya dengan memberikan masukan kepada pemerintah tentang pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk mendukung pencapaian MDGs.

Rujukan:

1. Clark, John. 1991. *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations*. Connecticut : Kumarian Press, Inc.
2. Moeljarto.T, 1995. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
3. "Gawat! Tahun 2012 Utang Indonesia di Luar Negeri Capai Rp 1.937 Triliun," <http://www.lensaindonesia.com/2012/02/05/gawat-tahun-2012-utang-indonesia-di-luar-negeri-capai-rp-1-937-triliun.html>, diakses pada 26 Juni 2012.
4. "Presiden: Separuh Negara di Dunia Tidak Capai MDGs," <http://news.detik.com/read/2012/06/23/013303/1948846/10/sby-tegaskan-kemiskinan-di-indonesia-tinggal-125-persen>, diakses pada 26 Juni 2012.
5. "Upaya Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs)," <http://www.bappenas.go.id/node/116/2581/upaya-pencapaian-millennium-development-goals-mdgs/>, diakses pada 27 Juni 2012.